

MENILIK (KEMBALI) NARASI PEREMPUAN DALAM WACANA NASIONALISME DI INDONESIA

Desintha Dwi Asriani

*Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
desintha@ugm.ac.id*

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan telaah kritis tentang wacana nasionalisme di Indonesia dalam perspektif feminisme. Di satu sisi, perempuan berperan penting dalam pembentukan nasionalisme mulai dari peristiwa perjuangan kemerdekaan hingga proyek pembangunan keluarga. Peran perempuan sangat sentral tapi rekognisi terhadapnya rendah. Demikian halnya dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Peran perempuan sangat krusial namun ruang untuk menampung aspirasi mereka terbatas. Sementara, perempuan pada hakikatnya tetaplah individu yang memiliki kepentingan "independen" tentang bagaimana kesalingan antara pembangunan diri, keluarga, dan negara seharusnya dilakukan. Namun proses konsultasi terkait dengan bagaimana dampak pembangunan IKN terhadap kehidupan perempuan termasuk mitigasinya belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, pembangunan IKN dapat menjadi momentum untuk menilik (kembali) bagaimana menempatkan narasi perempuan dalam pembentukan nasionalisme dalam konteks saat ini.

Kata kunci: *Gender; Narasi Perempuan; IKN; Nasionalisme*

1. PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Gagasan mengenai IKN bisa jadi sangat strategis sebagai upaya untuk melakukan penyegaran mengenai konsep berbangsa. Seperti yang tertulis dalam pasal 2 yang secara umum menekankan bahwa pembangunan IKN diharapkan dapat mengembangkan kota berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi representasi keberagaman bangsa Indonesia. Gagasan pemindahan ibu kota baru dapat memperkuat modal untuk mewujudkan imajinasi kolektif bangsa selama ini tentang kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam faktanya, arah dan tujuan pembangunan nasional senantiasa digerakkan dan bahkan dimediasi melalui kehendak bersama suatu bangsa terhadap cita-cita yang serupa. Meminjam istilah Benedict Anderson (1983) tentang *imagined community*, pembangunan IKN dapat dimaknai sebagai sebuah periode waktu untuk melihat bagaimana gagasan "kita" sebagai bangsa-yang dikonstruksikan sekaligus dihidupi oleh orang-orang yang merasa memiliki pengalaman bersama negaranya-kembali dirumuskan. Dengan kata lain nasionalisme bukan konsep yang statis melainkan dinamis. Kecintaan yang sama atau spirit nasionalisme kemudian menjadi salah satu isu mendasar dalam mendiskusikan dampak dan makna sosial dari perubahan sosial akibat pembangunan ibu kota baru.

Namun dalam perspektif gender, konsep mengenai *imagined community* dan wacana khusus tentang nasionalisme masih menjadi perdebatan. Teorisasi yang mereproduksi ideologi nasionalis sering kali tidak menghadirkan narasi perempuan secara proporsional (Silva, 2020; Walby, 2000; Yuval-Davis, 1993). Pengetahuan dan simbol tentang nasionalisme didominasi oleh narasi maskulin terutama yang berasosiasi dengan heroisme (Nagel 1998). Situasi ini selaras dengan kritik para filsuf feminis bahwa *bad science* muncul karena selalu ada asumsi yang bias, stereotip, dan androsentris pada data-data ilmu pengetahuan yang didokumentasikan dan disampaikan (Harding, 1986). Termasuk reproduksi pengetahuan tentang nasionalisme melalui buku-buku sejarah, kebijakan dan media yang tidak merekognisi secara seimbang narasi berbasis pengalaman perempuan.

Tulisan ini merupakan refleksi kritis tentang konsep pembangunan nasional yang dilandasi oleh kehendak untuk memenuhi hasrat kolektif “kita” sebagai bangsa melalui perspektif yang mengedepankan pengalaman perempuan. IKN dapat menjadi salah satu studinya.

2. NASIONALISME BERDASARKAN PENGALAMAN PEREMPUAN INDONESIA

Dikursus nasionalisme di Indonesia kurang lebih memiliki ciri yang sama dengan negara non-barat lainnya. Komunitas terbayang yang melahirkan konsep bangsa dan negara didasari pada imajinasi yang sama tentang pengalaman menjadi masyarakat terjajah. Sehingga tidak heran jika glorifikasi tentang perjuangan kemerdekaan yang diikuti dengan romantisasi perjuangan para pahlawan di medan perang sering mewarnai wacana nasionalisme. Pada konteks negara-negara non barat, ide tentang nasionalisme didasarkan pada keinginan kuat untuk membangun identitas nasional yang “khas” sebagai upaya untuk keluar dari bayang-bayang imperialisme. Kebutuhan untuk membangun identitas nasional inilah yang kemudian berdampak pada praktik budaya yang beragam.

Sejumlah studi yang mengembangkan perspektif gender telah memproblematisasi sejauh mana diskursus nasionalisme menciptakan ruang bagi perempuan. Yuval-Davis (1993) mencatat bahwa terdapat dualistik kewargaan perempuan yakni diakui sekaligus didiskriminasi. Sebagai warga negara perempuan mendapatkan legalitas yang sama. Namun terdapat sejumlah standar kesetaraan yang kembali bias pada pengalaman laki-laki yang harus dipenuhi perempuan. Misalnya perempuan dianggap perlu bergabung dengan militerisme untuk mendapatkan pengakuan yang sama terkait nasionalisme. Sehingga dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan kemakmuran bangsa, tanpa terkecuali di Indonesia, peran perempuan saja sering kali dieksklusi (Pohlman, 2018). Padahal, dalam sejarahnya sejumlah perempuan turut andil dengan cara yang berbeda. Dalam setiap rezim, perempuan juga senantiasa memiliki peran. Misalnya organisasi-organisasi politik perempuan yang sebagian besar menyuarakan isu-isu berbasis gender seperti perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan reproduksi. Namun peran mereka seringkali tidak direkognisi bahkan dianggap sebagai ancaman.

Dalam studi yang dilakukan Eunshil.K (2005) sejarah kehidupan *comfort women* di Korea Selatan juga seringkali absen dari diskursus tentang nasionalisme. Sementara dalam pembacaan lain keberadaan *comfort women* merupakan penanda masa sulit sebuah negara yang seharusnya juga menjadi dasar dalam membentuk imajinasi tentang siapa “kita” dan bagaimana “kita” sebagai bangsa harus bertindak. Literatur lain menyebutkan bahwa wacana nasionalisme di Indonesia sering berkelindan dengan hegemoni penguasa untuk mengobjektifikasi tubuh perempuan (Udasmoro, 2004). Misalnya dalam program pengendalian penduduk, ada cita-cita kolektif untuk mencapai kesejahteraan melalui keluarga bencana. Kontribusi perempuan sangat besar karena tubuhnya yang lebih sering menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun tubuh dan segala pengalaman yang bertumpu pada (tubuh)

perempuan tidak memiliki posisi yang sama sebagai sumber dari konstruksi pengetahuan tentang nasionalisme. Merujuk pada kritik Yuval-Davis (1993) bahwa nasionalisme sering merujuk pada konsepsi yang dibangun oleh para birokrat dan kaum intelektual dimana (tubuh) perempuan tidak menjadi bagiannya.

3. DISKURSUS NASIONALISME DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA PEMBANGUNAN IKN

Seperti yang dituliskan sebelumnya bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu penanda perubahan sosial yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Sementara makna tentang nasionalisme dapat terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks IKN, terdapat sejumlah konsekuensi yang berpengaruh juga terhadap praktik sosial masyarakat. Salah satunya adalah yang terkait kewajiban bagi para ASN/TNI/POLRI untuk berpindah ke ibu kota baru. Secara sosiologis, aktivitas perpindahan individu bukan personal teknis semata. Melainkan memiliki dampak yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan praktik budaya individu tersebut. Ada proses adaptasi terhadap situasi tempat tinggal baru yang mungkin tidak sama dengan daerah asal. Sejumlah media memberitakan bahwa para ASN tampak enggan untuk bermigrasi ke ibu kota baru karena khawatir tidak mendapatkan fasilitas seperti saat mereka tinggal di ibu kota lama (BBC-News, 2019).

Terkait dengan proses transisi dan adaptasi sebagai dampak dari aktivitas perpindahan tersebut, pengalaman perempuan atau para istri bisa jadi lebih kompleks. Beberapa waktu lalu, saya menjumpai beberapa istri yang mungkin terdampak dari perpindahan ibu kota ini. Mereka berencana untuk tidak ikut pindah setidaknya dalam kurun waktu tertentu. Pertimbangan yang paling besar adalah terkait dengan sekolah anak-anaknya. Kebutuhan untuk menyamakan kualitas pendidikan yang selama ini didapatkan dengan ketersediaan fasilitas di tempat baru adalah persoalan mendasar. Narasi-narasi ini merupakan salah satu contoh aspirasi berbasis pengalaman perempuan yang sering kali abai dari wacana dominan.

Dalam konteks *state of ibuism*, dapat dikatakan bahwa sikap nasionalisme istri ASN ditentukan melalui performanya sebagai pendamping/pendukung suami, pendidik anak dan manajer rumah tangga. Sehingga posisi para istri ASN/TNI/POLRI seolah-olah tidak ada pilihan selain mengikuti suaminya untuk pindah. Padahal jika dilihat lagi secara mendalam, para istri tersebut juga memiliki aktivitas/rutinitas/pekerjaan yang tidak mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Namun menjalani hubungan jarak jauh juga berdampak pada macetnya sistem fungsi keluarga yang selama ini dilakukan.

Tren yang terjadi meskipun perempuan seringkali mengidentifikasi dirinya sebagai ibu rumah tangga, tapi sejatinya mereka tetap memiliki aktivitas ekonominya sendiri. Muncul istilah *neo-ibusim*, dimana kategori peran gender tidak hanya dijalankan tapi berubah menjadi alat politis para perempuan untuk mendapatkan tujuannya yang personal (Ichsan Kabullah dan Fajri, 2021). Di sini dapat dipahami bahwa kategori perempuan, meskipun dalam kelompok yang sama sebagai istri ASN, adalah beragam. Jadi jika konsep tradisional *state of ibuism* diterapkan perpindahan tersebut juga dapat berdampak pada pengurangan TPAK perempuan secara signifikan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Yuval Davis (1993) bahwa penting untuk menghadirkan perspektif gender dalam mengembangkan konsep nasionalisme. Upaya ini ditujukan untuk menjamin bahwa imajinasi “kita” sebagai bangsa benar-benar merefleksikan apa yang sedang, telah dan akan dilakukan secara kolektif oleh semua warga negara dimana di dalamnya terdapat juga perempuan.

4. PENUTUP

Tulisan ini menyimpulkan bahwa narasi perempuan perlu direkognisi sebagai input dalam membangun konsep “kita” sebagai bangsa di momen pembangunan IKN. Kelompok perempuan sendiri juga beragam secara kelas sosial, ras, pekerjaan, etnis dan agama yang berpengaruh pada narasi yang tidak tunggal. Sehingga perlu juga mengintegrasikan pendekatan interseksionalitas untuk mengelola aspirasi bangsa secara inklusif.

REFERENSI

- Harding, Sandra. 1986. *The Science Question in Feminism*. London; Cornell University Press.
- Ichsan Kabullah, Muhammad, and M. Nurul Fajri. 2021. *Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019*. (*Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40(1):136–55. doi: 10.1177/1868103421989069).
- Nagel, Joane. 1998. *Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations*. (*Ethnic and Racial Studies* 21(2). doi: 10.1080/014198798330007).
- Pohlman, Annie. 2018. *Women and Nationalism in Indonesia*. (*Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 12(1):13. doi: 10.17509/historia.v12i1.12114).
- Silva, Belén Rojas. 2020. *Nation and Gender*. (*The Blackwell Encyclopedia of Sociology* 1–2. doi: 10.1002/9781405165518.wbeosn033.pub2).
- Udasmoro, Wening. 2004. *Konsep Nasionalisme Dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana Di Indonesia*. (*Humaniora* 16(2)).
- Walby, S. 2000. *Gender, Nations and States in a Global Era*. (*Nations and Nationalism* 6(4):523–40. doi: 10.1111/j.1354-5078.2000.00523.x).
- Yuval-Davis, Nira. 1993. *Gender and Nation*. (*Ethnic and Racial Studies* 16(4):621–32. doi: 10.1080/01419870.1993.9993800).